**POLEMIK DALAM KARIR PEREMPUAN INDONESIA**

**Ingesti Lady Rara Prastiwi**

**Dida Rahmadanik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

E-mail: didarahma@untag-sby.ac.id

**Abstrak**

Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam menitih sebuah karir wanita harus menghadapi polemik, salah satunya adalah perempuan harus memilih untuk meneruskan kiprahnya dalam dunia kerja atau mengurus keluarga dengan baik dan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor budaya yang mengatakan bahwa pekerjaan seorang wanita hanyalah berputar pada mengurus rumah tangga. Bahkan ketika wanita telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestic (di dalam rumah tangga) dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan polemik yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dalam menitih sebuah karir. Meskipun secara kodrati tugas wanita adalah mengurus keluarga, wanita juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.

**Kata kunci** : Kesetaraan, Perempuan, Karir, Budaya

***Abstract***

*Gender equality refers to equal circumstances between males and females in fulfillment of rights and obligations, but discrimination based on "female" or "male" still occurs in all aspects of life. The issue of a woman's career is that she must choose to continue her steps in the workforce or take good care of her family and become a mother. That's because there's a cultural factor that says a woman's job revolves around taking care of the household. Even when women have pursued a high level of education, it is still better to concentrate on family or housework than to take advantage of the expertise of higher education. This study an to eximpose the polysis faced by Indonesian women in the midst of a career. Although women's duties are inherently responsible for their families, women are just as entitled as the space and time to brood or career to achieve their goals as men should be able to achieve their desires without having to pick a family or a career and think about the point of view of the people around them.*

***Keywords:*** *equality, women, career, culture*

**Pendahuluan**

Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing- masing (Zainuddin, 2006: 1). Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi.

Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Misalnya peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestic dan laki-laki dalam kerja public. Dampak adanya pandangan tersebut menimbulkan bahkan menumbuhkan asumsi diskriminatif terhadap gender. Kesetaraan gender bukan lagi hal yang asing di telinga bangsa Indonesia. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan, hak-hak, dan kuasa. Contoh yang mencolok misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak dan rumah pada perempuan, sedangkan dalam hal mencari nafkah atau bekerja diberikan pada laki-laki.

Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam hal menempuh karir, perempuan sering kali dihadapkan oleh situasi yang membingungkan. Pertanyaan “Karir atau keluarga?” seringkali dilontarkan kepada wanita karir dan mereka di tuntut untuk memilih salah satu dari keduanya yang merupakan hal penting dalam hidup. Selain itu, Steorotip masyarakat bahwa wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik dari pada menjadi wanita karir dan stigma bahwa wanita karir tidak mengutamakan jodoh atau keluarga dapat menghilangkan motivasi para wanita untuk terus meraih apa yang mereka inginkan. Menurut Indriyani (2009) menyatakan perempuan mempunyai dua peran yaitu tradisi dan transisi. Tradisi menyangkut peran wanita dalam mengurus rumah tangga, sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Sedangkan transisi perempuan sebagai tenaga kerja aktif dalam mencari nafkah sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan atau wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, pandangan *miring* tentang wanita karir tidak serta merta luntur. Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Contohnya dalam budaya jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita hanya miliki tugas *macak, manak, lan masak*. Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun secara kodrati tugas wanita adalah mengurus keluarga, wanita juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh wanita Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dalam menitih sebuah karir dengan judul “Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia”.

**Metode Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode menuturkan data yang ada, missal situasi yang dialami, suatu hubungan, suatu kegiatan, pandangan, sikap, yang nampak, ataupun tatanan suatu proses yang sedang berlangsung dengan menggunakan analisis serta studi literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan melakukan observasi atau pengamatan berdasarkan pada landasan teori sebagai teknik pengumpulan data agar penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam kasus ini, teori gender, kesetaraan gender dan peran budaya Jawa dalam kesetaraan gender menjadi tolak ukur atau landasan dalam focus penelitian polemik dalam karir perempuan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, lokus penelitian adalah Indonesia khususnya pada pulau Jawa, sedangkan yang menjadi situs penelitian ini adalah karir perempuan Indonesia. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles Huberman, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

**Hasil dan Pembahasan**

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1). Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kodrati.

Misalnya peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dimana adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Berikut adalah parameter kesetaraan gender yang didalamnya terdapat indikator terkait kesetaraan gender yang terdiri dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. 1) Akses : mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yaqng akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Contohnya, perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan; 2) Partisipasi : memberikan kesempatan yang sama serta setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap program kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, perempuan boleh berpartisipasi dalam suatu partai politik; 3) Kontrol : ketentuan yang setara terkait dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Contohnya, Keberdayaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna; 4) Manfaat : menjamin bahwa suatu program atau kebijakan akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan keluarga.

Menurut Bappenas, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Dari aspek tersebut, Bappenas menetapkan sasaran pengukuran Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dalam mengevaluasi kesetaraan dan keadilan gender yaitu, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan keterwakilan dalam jabatan publik.

1) Pencapaian pendidikan : angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di semua jenjang pendidikan.

2) Partisipasi ekonomi : berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, dan teknisi hanya mencapai 46,31% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya mentok di 36,62%. Pada tahun 2018, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki, yakni hanya di angka 45% dan proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan.

3) Keterwakilan dalam jabatan publik : berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen adalah 17,32% dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, sedangkan perempuan hanya 97 orang.

Melihat dari hasil tersebut, tingkat wanita bekerja memang lebih rendah daripada laki-laki, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kaca mata budaya yang menganggap bahwa pekerjaan wanita hanyalah mengurus rumah dan keluarga. Budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Contohnya dalam budaya jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita hanya miliki tugas *macak, manak, lan masak*. Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan atau wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak merubah konsep bahwa pekerjaan wanita hanya berputar pada urus mengurus rumah.

Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Contohnya dalam budaya jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita hanya miliki tugas *macak, manak, lan masak*. Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Berbicara tentang kedudukan perempuan dalam budaya Jawa, perempuan berada dalam posisi di bawah laki-laki, karena dalam Budaya Jawa peran laki-laki dikonsepkan pekerja publik (luar rumah), sedangkan perempuan dikonsepkan pekerja domestic (di dalam rumah tangga). Ada masa gadis Jawa di mana dituntut untuk persiapan berumah tangga, biasanya mereka yang sudah dirasa cukup umur untuk itu kemudian di ”pingit”, yaitu larangan untuk keluar rumah. Budaya ini pula yang menghambat pendidikan perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini R.A. Kartini, seorang pelopor emansipasi perempuan Indonesia, menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong perjuangan R.A. Kartini yaitu lingkungan Jawa. Hal ini tergambarkan melalui surat Kartini yang menyatakan bahwa Budaya masyarakat Jawalah yang mengkungkung wanita. Perempuan dalam Budaya masyarakat Jawa, didudukkan dan diperankan sebagai keluarga dan masyarakat. Dalam rumah tangga, perempuan Jawa biasanya dituntut untuk melakukan 3 M, yaitu *Macak, Manak,* dan *Masak.*

Budaya Jawa memandang perempuan tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat yang beredar bahwa kaum perempuan tidak lain hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya di bawah kaum laki-laki. Bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami konsep unggah-ungguh (sopan santun). Perempuan harus bisa menjadi lakon yang baik dan menuruti semua perintah dari orang tuanya. Budaya patriarkis inilah yang kemudian hidup dan berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya. Selain mengenai sopan santun, anggapan bahwa anak perempuan kurang layak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Jawa. Selain itu, prioritas atas hak pendidikan tinggi dalam Budaya Jawa akan diberikan kepada anak laki-laki jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Karena pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang kondisional, melihat bagaimana kondisi kemampuan keluarga. Jika terlahir dari keluarga yang mampu, maka bisa meraih pendidikan yang sama. Namun, jika hal tersebut terjadi di kalangan keluarga yang tidak berkecukupan, solusi utama adalah dengan memberi pendidikan tinggi kepada anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga kelak. Karena mayoritas masyarakat mengatakan “*Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya akan kembali kedapur juga*.” Ungkapan ini seringkali berlalu lalang di telinga.

Bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestic dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. Dalam menempuh karirpun, perempuan sering kali dihadapkan oleh situasi yang membingungkan. Pertanyaan “Karir atau keluarga?” seringkali dilontarkan kepada wanita karir dan mereka di tuntut untuk memilih salah satu dari keduanya yang merupakan hal penting dalam hidup. Steorotip masyarakat tentang wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik dari pada menjadi wanita karir dan stigma bahwa wanita karir tidak mengutamakan jodoh atau keluarga dapat menghilangkan motivasi para wanita untuk terus meraih apa yang mereka inginkan. Meskipun secara kodrati tugas wanita adalah mengurus keluarga, wanita juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.

Pelabelan perempuan yang bekerja diluar rumah juga mendapat stereotype yang negatif, sehingga terjadinya diskriminasi serta ketidakadilan yang merugikan. Salah satu contoh yang biasa terjadi apabila laki-laki marah di anggap hal yang wajar dan sebagai laki-laki yang tegas. Namun disaat perempuan marah di anggap sebagai individu yang emosional dan tidak dapat menahan diri. Perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, bisnis, dan birokrat. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama sehingga nafkah yang dihasilkan perempuan di anggap sebagai tambahan.

**Simpulan**

Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun, dalam Budaya Jawa kesetaraan gender masih dibilang sangat rendah. Contohnya dalam hal pekerjaan, laki-laki ditempatkan dalam kerja publik sedangkan perempuan menempatk dalam kerja domestik yaitu mengurus rumah tangga. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa wanita hanya miliki tugas *macak, manak, lan masak*. Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Selain itu, prioritas atas hak pendidikan tinggi dalam Budaya Jawa diperuntukan bagi laki-laki. Bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik jika menjadi ibu rumah tangga (IRT) dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya.

Meskipun secara kodrati tugas wanita adalah mengurus keluarga, wanita juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Namun faktanya, tingkat wanita bekerja memang lebih rendah daripada laki-laki. Tertihat dari proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan, tahun 2010-2017 keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen hanya 17,32%, dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, sedangkan perempuan hanya 97 orang.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terkait tentang manfaat menjadi wanita karir selain menjadi ibu rumah tangga agar membuka kaca mata masyarakat yang masih berpedoman pada Budaya Jawa, membuka lebih banyak lowongan pekerjaan di sektor publik untuk perempuan, dan lebih memberdayakan ibu rumah tangga. Dari sisi hukumpun wanita pekerja mendapat perlindungan agar terhindar dari eksploitasi. Manfaat dari Wanita berkarir adalah dapat menyumbang penghasilan atau pendapatan keluarga dan meningkatkan kualitas atau taraf hidup keluarga, karena konsumsi keluarga tidak akan bergantung pada gaji seorang suami atau laki-laki saja. Sebagai wanita, seharusnya dapat membuktikan bahwa steorotip miring masyarakat tentang wanita karir salah. Wanita karir atau pekerja harus dapat membuktikan bahwa mereka sanggup mengurus rumah tangga dan keluarga tanpa meninggalkan karir yang telah ditempuh.

**Daftar Pustaka**

1. Buku

Sayyidah, Nadifah (2013). “Konsep Gender Terhadap Peran Perempuan dalam Budaya Jawa”. Jawa Tengah: STAI AL-ANWAR.

Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press

1. website

Kemenpppa., *Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan*, Jakarta: Kemen PPPA [Internet], 2017.

 [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

Fiji., *Kepala Bappenas Tegaskan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Warta Ekonomi [Internet], 2019.

 <https://m.wartaekonomi.co.id>

Adrinof., *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terus Meningkat*, Jakarta: Bappenas [Internet], 2015.

 [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Bappenas., *Kesetaraan Gender Akan Meningkat Bila Permasalahan Gender Terlebih Dahulu Diselesaikan*, Jakarta: Bappenas [Internet], 2017.

 [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

1. Jurnal

Indriyani, A. (2009). “Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang)”. *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

.